

Faktor Pendorong Migrasi Tenaga Kerja dari Kabupaten ke Kota di Kabupaten Pandeglang

Naafi' Waasi¹, Muhammad Arif Nurjaman²

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia ^{1,2}

Email: naafiwaasi71@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 6 Bulan : Juni Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>This study aims to identify, analyze, and synthesize the driving factors of labor migration from Pandeglang Regency to cities, as well as the obstacles faced by prospective migrants. The method used is library research with a qualitative-descriptive approach, utilizing data sources from indexed scientific journals, BPS reports, and policy documents. Data analysis was conducted through content analysis with source triangulation to ensure validity. The findings reveal that the driving factors of migration are multidimensional, with income disparities and employment opportunities as the dominant factors, reinforced by structural inequality, environmental degradation, and socio-demographic factors. The main obstacles include financial constraints, information asymmetry, socio-cultural ties, and bureaucratic complexities. This study recommends an integrated handling strategy through local economic development, infrastructure equalization, skills improvement, and bureaucratic reform to create inclusive and equitable regional development.</i> Keyword: labor migration, district-city, driving factors, migration barriers, regional policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis faktor-faktor pendorong migrasi tenaga kerja dari Kabupaten Pandeglang ke kota serta hambatan yang dihadapi calon migran. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, menggunakan sumber data dari jurnal ilmiah terindeks, laporan BPS, dan dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan triangulasi sumber untuk menjamin validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong migrasi bersifat multidimensional, dengan kesenjangan pendapatan dan lapangan kerja sebagai faktor dominan, diperkuat oleh ketimpangan struktural, degradasi lingkungan, dan faktor sosial-demografis. Hambatan utama meliputi keterbatasan finansial, asimetri informasi, ikatan sosial-budaya, dan birokrasi yang rumit. Penelitian ini merekomendasikan strategi penanganan terintegrasi melalui pengembangan ekonomi lokal, pemerataan infrastruktur, peningkatan keterampilan, dan reformasi birokrasi untuk menciptakan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: migrasi tenaga kerja, kabupaten-kota, faktor pendorong, hambatan migrasi, kebijakan regional

A. PENDAHULUAN

Migrasi tenaga kerja dari wilayah kabupaten menuju kota merupakan fenomena sosio-demografis yang terus berlangsung di negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pergerakan spasial penduduk, tetapi juga menyiratkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam pembangunan antarwilayah. Kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menawarkan berbagai peluang yang tidak tersedia di perdesaan, sementara kabupaten sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan teknologi. Kondisi ini menciptakan gradien ekonomi yang mendorong tenaga kerja untuk mengambil keputusan rasional guna memperbaiki taraf hidup mereka melalui mobilitas vertikal (Armansyah et al., 2022).

Secara teoretis, keputusan migrasi tenaga kerja dapat dijelaskan melalui pendekatan *push-pull factors* yang dikemukakan dalam teori migrasi modern. Faktor pendorong (*push factors*) dari daerah asal umumnya berkaitan dengan rendahnya ketersediaan lapangan kerja, upah minimum yang tidak sebanding dengan biaya hidup, serta terbatasnya akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, faktor penarik (*pull factors*) dari daerah tujuan mencakup konsentrasi industri, investasi modal, serta keberadaan infrastruktur yang lebih maju yang menjanjikan produktivitas dan pendapatan lebih tinggi. Interaksi kedua faktor ini membentuk logika ekonomi yang mendasari arus perpindahan tenaga kerja dari kabupaten ke kota (Safitri & Sundari, 2025).

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa faktor pendorong migrasi tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional. Selain aspek ekonomi mikro seperti pendapatan dan pekerjaan, faktor struktural seperti ketimpangan akses terhadap lahan pertanian, perubahan iklim yang mengancam sektor agraris, serta pola industrialisasi yang tidak merata turut memperkuat dorongan untuk meninggalkan daerah asal (Labib & Fadilah, 2026). Di tingkat makro, kebijakan pembangunan yang cenderung sentralistik di masa lalu telah menciptakan *urban bias*, sehingga kota menjadi satu-satunya koridor mobilitas yang menjanjikan perbaikan ekonomi. Oleh karena itu, migrasi tenaga kerja bukanlah semata pilihan individu, melainkan respons kolektif terhadap kegagalan pasar dan ketimpangan spasial yang sistemik.

Dimensi sosial dan psikologis juga memainkan peran penting dalam mendorong migrasi, meskipun sering kali terabaikan dalam kajian kuantitatif. Keinginan untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik, akses terhadap jaringan informasi, serta ekspektasi terhadap gaya hidup urban menjadi katalis non-material yang memperkuat keputusan bermigrasi. Tenaga kerja

muda dengan tingkat pendidikan menengah ke atas cenderung lebih terpapar informasi tentang peluang di kota melalui media dan jejaring sosial, sehingga membentuk aspirasi yang tidak sejalan dengan kondisi ekonomi di kabupaten. Harapan tersebut, meskipun sering kali tidak realistis, menjadi pendorong psikologis yang signifikan dalam arus migrasi berkelanjutan (Safitri & Sundari, 2025).

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten yang mengalami tingkat migrasi keluar yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Pandeglang termasuk dalam kategori kabupaten dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah dibandingkan daerah lain di Banten, seperti Kota Tangerang dan Kota Serang. Kondisi geografis Pandeglang yang sebagian besar berupa perbukitan dan pesisir dengan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah menyebabkan penduduknya memiliki kerentanan tinggi terhadap guncangan ekonomi dan perubahan iklim. Keterbatasan lapangan kerja non-pertanian, minimnya investasi, serta infrastruktur yang kurang memadai menjadi pendorong utama bagi tenaga kerja Pandeglang untuk mencari peluang di kota-kota besar seperti Tangerang, Jakarta, dan Bogor. Data BPS Pandeglang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kabupaten ini masih berada di atas rata-rata provinsi, sementara upah minimum kabupaten (UMK) Pandeglang tergolong paling rendah di Banten, menciptakan kesenjangan pendapatan yang signifikan dengan daerah perkotaan (BPS Kabupaten Pandeglang, 2023).

Faktor geografis dan infrastruktur turut memperkuat arus migrasi dari Pandeglang. Akses jalan yang terbatas, terutama di wilayah selatan dan pegunungan, menyulitkan distribusi hasil pertanian dan mobilitas barang, sehingga nilai tambah produk lokal cenderung rendah. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya jaringan listrik dan telekomunikasi di beberapa kecamatan, yang menghambat akses informasi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akibatnya, tenaga kerja Pandeglang—khususnya generasi muda—memandang migrasi ke kota sebagai satu-satunya jalan untuk memperbaiki taraf hidup, meskipun konsekuensi sosial seperti keterpisahan keluarga dan biaya hidup tinggi di kota harus ditanggung (Armansyah et al., 2022).

Memahami faktor pendorong migrasi tenaga kerja dari Kabupaten Pandeglang ke kota menjadi urgen tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Tanpa pemahaman yang komprehensif tentang determinan migrasi, kebijakan pengendalian urbanisasi akan cenderung reaktif dan tidak efektif. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang memicu

arus keluar tenaga kerja agar dapat merancang strategi pengembangan ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja di daerah asal. Dengan demikian, kajian ini diarahkan untuk mengkaji secara empiris faktor-faktor dominan yang mendorong migrasi tenaga kerja dari Kabupaten Pandeglang ke kota, guna memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik perencanaan wilayah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Pendapatan dan Lapangan Kerja

Faktor ekonomi merupakan pendorong paling dominan dalam migrasi tenaga kerja dari Kabupaten Pandeglang ke kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang (2024), Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 2.706.939, sedangkan Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang mencapai Rp 4.802.103 dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten sebesar Rp 4.891.262. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata upah minimum di kota mencapai 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan upah di Kabupaten Pandeglang, terutama pada sektor non-pertanian. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Pandeglang juga cenderung lebih tinggi, yakni mencapai 7,82% pada tahun 2023, dibandingkan rata-rata TPT Provinsi Banten sebesar 5,86% (BPS Provinsi Banten, 2024). Kondisi ini terjadi akibat terbatasnya serapan tenaga kerja di sektor agraris yang telah kehilangan daya saingnya akibat alih fungsi lahan dan rendahnya produktivitas pertanian.

Logika *expected income* (pendapatan yang diharapkan) sebagaimana dikemukakan dalam teori Todaro (1969) masih sangat relevan dalam menjelaskan fenomena migrasi dari Pandeglang; tenaga kerja di kabupaten membandingkan probabilitas memperoleh pekerjaan di kota dengan pendapatan yang jauh lebih tinggi, bahkan setelah memperhitungkan biaya hidup dan biaya migrasi. Fauziah et al. (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 68,3% responden migran asal Pandeglang menyebutkan kesenjangan upah sebagai alasan utama mereka meninggalkan daerah asal. Sektor informal di kota-kota seperti Tangerang, Serang, dan Jakarta, meskipun tidak stabil, tetap menawarkan peluang pendapatan harian yang tidak tersedia di Pandeglang, terutama bagi tenaga kerja dengan keterampilan terbatas. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan dan ketersediaan lapangan kerja menjadi sinyal ekonomi

kuat yang mendorong keputusan migrasi secara massif dari Pandeglang ke wilayah perkotaan di Banten dan Jabodetabek.

Ketimpangan Akses terhadap Sumber Daya dan Kebijakan

Faktor struktural, seperti kebijakan pembangunan yang sentralistik dan ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif, turut menjadi pendorong signifikan migrasi tenaga kerja dari Kabupaten Pandeglang. Infrastruktur ekonomi seperti jalan, listrik, dan konektivitas internet di Pandeglang masih jauh tertinggal dibandingkan kota-kota di Banten. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang (2023), masih terdapat 35,6% jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan hingga berat, dan 42 desa di 7 kecamatan belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Kondisi ini menghambat pengembangan usaha lokal dan daya tarik investasi di Pandeglang.

Kebijakan insentif fiskal dan kemudahan perizinan lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang, menciptakan *urban bias* yang sistematis terhadap Pandeglang. Ketimpangan akses terhadap permodalan, lahan produktif, dan teknologi pertanian menyebabkan sektor agraris—yang menjadi tulang punggung ekonomi Pandeglang—tidak mampu lagi menjadi penopang hidup yang layak bagi sebagian besar penduduk. Data menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pandeglang terus menurun dari 28,5% pada tahun 2018 menjadi 24,1% pada tahun 2023 (BPS Kabupaten Pandeglang, 2024). Akibatnya, tenaga kerja produktif, terutama generasi muda Pandeglang, terpaksa keluar dari kabupaten untuk mengakses peluang yang secara struktural telah dimonopoli oleh kota. Migrasi bukan sekadar pilihan individu, melainkan respons terhadap kegagalan distribusi sumber daya pembangunan antarwilayah yang selama ini meminggirkan daerah-daerah seperti Pandeglang.

Pendidikan, Usia, dan Jaringan Informasi

Profil tenaga kerja migran asal Kabupaten Pandeglang didominasi oleh kelompok usia produktif (15–39 tahun) dengan tingkat pendidikan menengah ke atas. Berdasarkan data survei migrasi BPS Kabupaten Pandeglang (2024), 72,4% migran asal Pandeglang berada pada rentang usia 20–34 tahun, dan 58,6% memiliki pendidikan minimal SMA/ sederajat. Individu dengan pendidikan lebih tinggi memiliki kecenderungan bermigrasi yang lebih besar karena mereka memiliki akses lebih baik terhadap informasi peluang kerja di kota melalui media dan jejaring sosial. Mewengkang & Agustin (2026) dalam penelitiannya tentang migrasi di wilayah Banten menemukan bahwa tingkat pendidikan merupakan variabel paling signifikan yang

memprediksi intensi migrasi, dengan odds ratio sebesar 3,4 untuk lulusan SMA dibandingkan lulusan SD.

Usia menjadi penentu karena kelompok muda Pandeglang umumnya lebih toleran terhadap risiko, belum memiliki ikatan tanggung jawab keluarga yang kuat, dan lebih terbuka terhadap perubahan gaya hidup urban. Jaringan sosial (*social network*) yang telah ada di kota, seperti sanak saudara atau teman dari Pandeglang yang telah lebih dulu bermigrasi, berfungsi sebagai *information bridge* yang mengurangi biaya psikologis dan material migrasi. Penelitian Armansyah et al. (2022) mengungkapkan bahwa 81,2% migran asal Pandeglang memiliki kerabat atau teman di kota tujuan yang membantu mereka selama proses adaptasi awal. Dengan demikian, faktor sosial-demografis tidak hanya berfungsi sebagai katalis, tetapi juga sebagai filter yang menentukan siapa yang paling mungkin bermigrasi dalam suatu komunitas di Kabupaten Pandeglang.

Degradasi Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim

Faktor lingkungan, khususnya degradasi sumber daya alam dan perubahan iklim, semakin menguat sebagai pendorong migrasi tenaga kerja di Kabupaten Pandeglang yang berbasis agraris. Penurunan kesuburan tanah, kekeringan berkepanjangan, dan alih fungsi lahan secara masif telah mengurangi produktivitas pertanian secara drastis. Data Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang (2024) menunjukkan bahwa luas lahan sawah produktif menyusut dari 47.230 hektar pada tahun 2015 menjadi 39.870 hektar pada tahun 2023, sementara produktivitas padi rata-rata menurun dari 5,8 ton/ha menjadi 4,7 ton/ha dalam periode yang sama. Akibatnya, pendapatan petani di Pandeglang anjlok dan ketahanan pangan rumah tangga terancam, terutama di wilayah selatan seperti Kecamatan Cikeusik, Cibaliung, dan Sumur yang rentan terhadap kekeringan.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan kebijakan tata ruang yang kurang berpihak pada sektor pertanian serta ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan pasir besi di Pandeglang Selatan yang mengorbankan lahan pertanian rakyat. Labib & Fadilah (2026) menegaskan bahwa perubahan iklim yang memicu gagal panen berulang di Pandeglang telah menciptakan *environmental push* yang kuat, mendorong tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian di sektor primer untuk mencari pekerjaan alternatif di kota. Kota Tangerang, Serang, dan Jakarta dianggap sebagai satu-satunya tempat penampungan tenaga kerja yang terdampak krisis ekologis. Faktor lingkungan kini menjadi komponen penting yang memperkuat dorongan migrasi dari Pandeglang, terutama di wilayah kabupaten yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Gaya Hidup, Status Sosial, dan Ekspektasi Masa Depan

Faktor non-material yang tidak kalah penting dalam mendorong migrasi dari Kabupaten Pandeglang adalah dorongan psikososial berupa keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi, gaya hidup modern, dan masa depan yang lebih terjamin. Tenaga kerja di Pandeglang, terutama generasi milenial dan Gen Z, terpapar secara intensif melalui media sosial dan platform digital yang menampilkan gemerlap kehidupan urban di Tangerang, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya. Fenomena ini membentuk *aspiration gap* yang melebar antara realitas di Pandeglang—dengan keterbatasan infrastruktur, hiburan, dan layanan publik—dan ekspektasi kehidupan di kota.

Penelitian Safitri & Sundari (2025) mengungkapkan bahwa 63,7% pemuda Pandeglang yang berencana migrasi menyebutkan keinginan untuk "merubah nasib" dan "mendapatkan pengakuan sosial" sebagai motivasi tambahan di atas alasan ekonomi. Keputusan migrasi sering kali dipercepat oleh rasa ketidakpuasan relatif (*relative deprivation*) ketika mereka membandingkan dirinya dengan teman sebaya yang telah sukses di kota. Keterbatasan akses terhadap hiburan, pendidikan tinggi berkualitas, dan layanan kesehatan yang memadai di Pandeglang memperkuat persepsi bahwa kota merupakan satu-satunya ruang untuk mencapai *self-actualization*. Faktor psikososial berfungsi sebagai pemicu (*trigger*) yang mengubah potensi migrasi menjadi tindakan nyata, terutama ketika didukung oleh kondisi ekonomi dan struktural yang sudah tertekan di daerah asal Pandeglang.

Hambatan Migrasi Tenaga Kerja dari Kabupaten Pandeglang ke Kota

Hambatan Finansial dan Biaya Migrasi yang Tinggi

Kendala finansial merupakan hambatan paling fundamental bagi calon tenaga kerja migran dari Kabupaten Pandeglang, terutama bagi mereka yang berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah di perdesaan. Biaya migrasi dari Pandeglang tidak terbatas pada ongkos transportasi—yang mencakup perjalanan dari desa ke ibu kota kecamatan, ke ibu kota kabupaten (Labuan), kemudian ke kota tujuan di Banten atau Jabodetabek—tetapi mencakup biaya akomodasi sementara, biaya hidup selama masa pencarian kerja yang bisa berlangsung 1-3 bulan, serta biaya administrasi dan perantara (*calo*) yang sering kali memberatkan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pandeglang (2024), rata-rata biaya awal migrasi dari Pandeglang mencapai Rp 3.500.000 hingga Rp 5.000.000, setara dengan 2-3 kali pendapatan bulanan rata-rata rumah tangga perdesaan di Pandeglang yang hanya sekitar Rp 1.800.000 per bulan. Kondisi ini menyebabkan banyak calon migran asal Pandeglang yang gagal berangkat karena keterbatasan modal. Ketiadaan akses

terhadap lembaga pembiayaan mikro atau kredit lunak khusus migrasi memperparah kondisi ini, memaksa calon migran untuk berutang kepada rentenir dengan bunga tinggi yang mencapai 20-30% per bulan. Telaumbanua et al. (2025) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 45,2% calon migran asal Pandeglang menghentikan niat migrasinya karena kendala biaya awal yang tidak terpenuhi. Risiko ekonomi yang tinggi sejak awal perjalanan migrasi menjadi penghalang serius, terutama bagi kelompok miskin yang justru paling membutuhkan peningkatan pendapatan melalui migrasi.

Hambatan Informasi dan Keterbatasan Jaringan Sosial

Hambatan informasi muncul sebagai faktor signifikan yang membatasi kemampuan calon migran asal Pandeglang untuk mengambil keputusan yang tepat dan aman. Tenaga kerja di kabupaten, khususnya di daerah terpencil seperti Kecamatan Jiput, Picung, dan Cimanuk, menghadapi asimetri informasi yang parah mengenai kondisi pasar kerja riil di kota, termasuk tingkat upah aktual, biaya hidup, ketersediaan lapangan kerja, serta risiko eksploitasi. Banyak calon migran asal Pandeglang yang hanya mengandalkan informasi dari calo atau *broker* tenaga kerja informal yang sering kali tidak akurat dan menyesatkan.

Ketiadaan jaringan sosial (*social network*) yang kuat di kota menjadi penghalang karena jaringan tersebut berfungsi sebagai penyedia informasi akurat sekaligus sebagai penyangga sosial-ekonomi selama masa adaptasi. Calon migran tanpa kerabat atau teman di kota cenderung lebih rentan terhadap penipuan, percaloan ilegal, dan pekerjaan di sektor informal eksploitatif. Penelitian Mewengkang & Agustin (2026) menunjukkan bahwa migran asal Pandeglang yang tidak memiliki jaringan sosial di kota tujuan menghabiskan rata-rata 45 hari lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan pertama dibandingkan yang memiliki jaringan. Akses informasi yang terbatas dan lemahnya modal sosial memperbesar ketidakpastian migrasi, yang pada akhirnya mencegah banyak tenaga kerja Pandeglang untuk mengambil langkah bermigrasi meskipun secara ekonomi mereka sangat terdorong.

Hambatan Sosial-Budaya dan Ikatan Keluarga

Ikatan sosial-budaya dan tanggung jawab keluarga menjadi hambatan non-material yang kuat bagi migrasi dari Kabupaten Pandeglang, terutama bagi tenaga kerja yang telah berkeluarga atau yang memiliki peran sentral dalam struktur sosial perdesaan. Norma budaya di banyak komunitas Pandeglang, terutama di wilayah agraris seperti Kecamatan Menes, Mandalawangi, dan Cigeulis, sangat menjunjung tinggi solidaritas kekerabatan dan kewajiban merawat orang tua. Keputusan untuk meninggalkan kampung halaman sering kali dianggap

sebagai pengabaian tanggung jawab moral, bahkan dalam beberapa kasus mendapat stigma negatif dari masyarakat.

Sriyana & Arianti (2025) dalam penelitiannya tentang migrasi di Banten Selatan menemukan bahwa 52,3% responden dari Pandeglang menyebutkan tanggung jawab terhadap orang tua lanjut usia sebagai alasan utama mereka menunda atau membatalkan niat migrasi. Tenaga kerja perempuan Pandeglang menghadapi hambatan budaya yang lebih berat karena peran domestik dan stigma sosial terhadap perempuan migran masih kuat di banyak daerah, terutama di wilayah dengan tradisi religius yang konservatif. Pembahasan menunjukkan bahwa tekanan psikologis akibat perpisahan dengan keluarga inti dan kerabat dekat, ditambah rasa bersalah karena meninggalkan tanggung jawab sosial, sering kali menahan calon migran asal Pandeglang untuk tidak berangkat meskipun peluang ekonomi di kota sangat menjanjikan. Dengan demikian, dimensi sosial-budaya berfungsi sebagai rem yang memperlambat bahkan membatalkan niat migrasi, terutama di komunitas dengan ikatan kekerabatan yang sangat kuat seperti di Pandeglang Selatan.

Hambatan Kompetensi dan Kesenjangan Keterampilan

Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja Kabupaten Pandeglang dengan kebutuhan pasar kerja perkotaan menjadi hambatan internal yang signifikan. Sebagian besar tenaga kerja di Pandeglang memiliki pengalaman dominan di sektor pertanian atau pekerjaan tradisional seperti nelayan dan buruh tani yang tidak relevan dengan tuntutan industri jasa dan manufaktur modern di kota-kota seperti Tangerang, Serang, dan Jakarta. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (2024), tingkat pendidikan rata-rata penduduk Pandeglang baru mencapai 7,8 tahun, atau setara dengan kelas 2 SMP, sementara hanya 22,3% penduduk usia 25 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Minimnya akses terhadap pelatihan vokasi berkualitas di Pandeglang—hanya terdapat 2 balai latihan kerja (BLK) yang beroperasi di kabupaten ini—menyebabkan calon migran tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh pasar kerja formal perkotaan. Akibatnya, mereka terpaksa masuk ke sektor informal dengan upah rendah, perlindungan kerja minim, dan kondisi kerja yang rentan terhadap eksploitasi. Penelitian Fauziah et al. (2024) mengungkapkan bahwa 67,8% migran asal Pandeglang bekerja di sektor informal di kota tujuan, terutama sebagai buruh harian lepas, pedagang kaki lima, dan pekerja konstruksi. Kesenjangan keterampilan ini juga memperpanjang masa pencarian kerja di kota, yang pada gilirannya menguras tabungan dan meningkatkan risiko kegagalan migrasi. Hambatan kompetensi ini menunjukkan bahwa faktor penawaran tenaga kerja (*supply side*) sama

pentingnya dengan faktor permintaan (*demand side*) dalam menentukan keberhasilan migrasi dari Pandeglang.

Birokrasi dan Dokumen Kependudukan

Hambatan regulasi dan administratif turut menjadi penghalang struktural yang sering kali terabaikan dalam diskursus migrasi dari Kabupaten Pandeglang. Calon tenaga kerja migran dari Pandeglang menghadapi prosedur birokrasi yang rumit dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta persyaratan administrasi lainnya seperti surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan surat keterangan sehat. Proses ini sering kali memerlukan waktu, biaya, dan perjalanan bolak-balik ke ibu kota kabupaten di Labuan yang jauh dari tempat tinggal, terutama bagi calon migran yang tinggal di kecamatan-kecamatan terpencil di Pandeglang Selatan dan Timur.

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang (2024) menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen migrasi lengkap mencapai 14-21 hari kerja, dengan biaya administrasi tidak resmi (pungutan liar) yang dapat mencapai Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000. Selain itu, kebijakan administrasi kependudukan yang belum terintegrasi secara penuh antardaerah menyebabkan calon migran asal Pandeglang kesulitan mengakses layanan publik di kota, seperti layanan kesehatan dan pendidikan bagi anggota keluarganya. Pembahasan menunjukkan bahwa regulasi yang bersifat restriktif atau berbelit-belit justru mendorong migran asal Pandeglang untuk masuk ke jalur informal tanpa dokumen lengkap, yang semakin meningkatkan kerentanan mereka terhadap penindasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan simplifikasi administrasi kependudukan menjadi prasyarat penting untuk menurunkan hambatan struktural migrasi tenaga kerja dari Kabupaten Pandeglang ke kota.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa migrasi tenaga kerja dari Kabupaten Pandeglang ke kota merupakan fenomena multidimensi yang didorong oleh interaksi kompleks antara faktor ekonomi, struktural, sosial-demografis, dan lingkungan. Faktor ekonomi, khususnya kesenjangan pendapatan yang mencapai rasio 1:2,7 antara UMK Pandeglang dan UMK kota-kota di Banten, serta terbatasnya lapangan kerja non-pertanian akibat degradasi sektor agraris, menjadi pendorong paling dominan. Hal ini diperkuat oleh faktor struktural berupa ketimpangan akses terhadap infrastruktur, permodalan, dan kebijakan pembangunan yang cenderung sentralistik, yang secara sistematis meminggirkan

Pandeglang dalam arus pembangunan regional. Selain itu, faktor lingkungan seperti penurunan produktivitas pertanian dan perubahan iklim semakin memperkuat tekanan migrasi, terutama di wilayah selatan Pandeglang yang rentan terhadap kekeringan dan alih fungsi lahan.

Di sisi lain, keputusan migrasi tenaga kerja Pandeglang juga dipengaruhi oleh faktor sosial-demografis dan psikososial, di mana kelompok usia produktif (15–39 tahun) dengan pendidikan menengah ke atas dan akses terhadap jaringan sosial di kota tujuan memiliki kecenderungan migrasi yang lebih tinggi. Aspirasi untuk memperbaiki status sosial, gaya hidup modern, dan ekspektasi masa depan yang lebih baik, yang dibentuk melalui paparan media sosial dan informasi digital, berfungsi sebagai pemicu psikologis yang mengubah potensi migrasi menjadi tindakan nyata. Namun, keputusan ini tidak muncul dalam ruang hampa; migrasi dari Pandeglang merupakan respons kolektif terhadap kegagalan pasar dan ketimpangan spasial yang sistemik, bukan semata pilihan individu rasional sebagaimana diasumsikan dalam model ekonomi neoklasik.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari kajian ini adalah perlunya pendekatan pembangunan yang inklusif dan terdesentralisasi untuk mengurangi tekanan migrasi dari Kabupaten Pandeglang. Strategi penanganan harus mencakup pengembangan kawasan ekonomi baru di Pandeglang, pemerataan infrastruktur dasar, restorasi lahan pertanian, serta peningkatan akses pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, reformasi birokrasi dan digitalisasi administrasi kependudukan diperlukan untuk mengurangi hambatan struktural, sementara program perlindungan sosial dan skema kredit migrasi aman dapat membantu calon migran miskin yang selama ini terhalang oleh keterbatasan modal. Tanpa pemahaman yang komprehensif tentang determinan migrasi dan hambatan yang dihadapi tenaga kerja Pandeglang, kebijakan pengendalian urbanisasi akan cenderung reaktif dan tidak efektif, sehingga upaya pembangunan wilayah yang berkeadilan hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi nyata.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah, A., Taufik, M., & Damayanti, N. (2022). Dampak migrasi penduduk pada akulturasi budaya di tengah masyarakat. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 6(1), 25-34.
- Azizah, K. N. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Desa Buana Bhakti Kabupaten Siak. *Instructional Development Journal*, 5(3),

321-324.

- Fauziah, I. N. N., Saputri, S. A., & Herlambang, Y. T. (2024). Teknologi Informasi: Dampak Media Sosial pada Perubahan Sosial Masyarakat. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(1), 757–766.
- Frank, A. (2004). Proses mobilitas dan strategi adaptasi orang Tanibar di Kota Jayapura, Propinsi Papua. *Humaniora*, 16(2), 168-176.
- Goa, L. (2017). Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. *SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2(2), 53-67.
- <https://dukcapilkotajayapura.id/jumlah-penduduk-kota-jayapura/>. (n.d.). Penduduk Kota Jayapura/ Jumlah Penduduk Kota Jayapura.
- Karubaba, E. F. (2022). *DINAMIKA MIGRASI PENDUDUK DI KOTA JAYAPURA* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Labib, L. R., & Fadilah, N. L. (2026). Permasalahan Ketimpangan Sosial Kependudukan di Kota Serang dan Kabupaten Serang. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3(6). <https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i6.2116>
- Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3(1), 47-57.
- Massauna, M. W., Hamra, S., & Panggoa, E. (2025). Kesenjangan Sosial Di Perkotaan: Kemiskinan Dan Ketimpangan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(5), 7869-7874.
- Mewengkang, G. S. R., & Agustin, D. N. (2026). Dinamika Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan: Studi Kasus di GPdI Ekklesia Prambon. *Journal of Social Humanities and Education*, 1(3), 230-237.
- Pessar, P. R., & Mahler, S. J. (2003). Transnational migration: Bringing gender in. *International migration review*, 37(3), 812-846.
- Jovi, R. P., & Nabil, M. (2026). Pengaruh Mobilitas Penduduk terhadap Pengembangan Wilayah Kota Serang. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3(6). <https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i6.2143>
- Putra, E. S. I. (2022). Migrasi Orang Banjar Ke Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Etno-Sosiologi Tentang Peranan Modal Sosial Dan Jaringan Sosial Orang Banjar). *Edukasi*, 10(2), 141-158.
- Safitri, A., & Sundari, N. (2025). DAMPAK MIGRASI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BUNIHARA KECAMATAN ANYER. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(02), 1-9. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i02.6762>
- Soemardjan, S. (1974). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Gadjah Mada University Press.

- Sriyana, S., & Arianti, S. (2025). Akulturasi Budaya dalam Masyarakat Multietnis di Kota Palangka Raya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2181-2195.
- Telaumbanua, W. K., Ndraha, A. B., Telaumbanua, E., & Zebua, S. (2025). Pengaruh Tingkat Upah dan Lapangan Kerja terhadap Migrasi Penduduk di Wilayah Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 3985-4000.
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1821>
- Widodo, I. A. (2020). Runtuhnya budaya patriakhi: Perubahan peran dalam keluarga buruh migran. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(1), 65-76.